



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2006-2007**

JUM'AT, 20 JULI 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2006-2007**

JUM'AT, 20 JULI 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2007**

AIPO menjadi AIPA, diharapkan organisasi ini akan menjadi lembaga yang lebih *powerful* seiring dengan perkembangan ASEAN.

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang IV ini. Dalam masa reses pendek ini, Komisi-Komisi Dewan akan melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas dalam masa reses. Selanjutnya, ijinkanlah kami menutup Sidang Dewan ini dengan ucapan syukur *Alhamdulillahi Robbil' alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Juli 2007

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,



H. R. AGUNG LAKSONO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PENUTUPAN MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2006 - 2007

JUM'AT, 20 JULI 2007

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,***

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang IV Tahun 2006 - 2007 yang telah dimulai sejak 7 Mei 2007 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 15 Agustus 2007 yang akan datang.

Pada acara Penutupan Masa Sidang IV ini, kami akan menyampaikan pidato penutupan masa sidang yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan serta tanggapan Dewan terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia akhir-akhir ini serta berbagai peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

Masa Sidang IV yang telah berjalan selama 50 hari kerja atau 75 hari kalender adalah masa sidang yang sangat padat dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Melalui agenda yang telah ditetapkan oleh

Badan Musyawarah DPR RI, ketiga fungsi tersebut telah dilaksanakan secara optimal atas dasar alokasi waktu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan fungsi Dewan juga dilengkapi dengan aktivitas yang sangat intens yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi serta Alat Kelengkapan terkait dalam bentuk Forum Konsultasi, baik dengan Presiden maupun dengan DPD RI. Dalam Forum Konsultasi dengan Presiden telah berkembang dialog yang cukup hangat antara DPR dengan Presiden, khususnya yang berkaitan dengan hubungan dua lembaga yang akhir-akhir ini dinilai oleh sementara pihak kurang harmonis, yang bermula dari ketidakhadiran Presiden dalam memberikan keterangan secara langsung dalam Rapat Paripurna Dewan berkaitan dengan interpelasi DPR RI. Kalangan Dewan menghendaki agar ke depan Presiden lebih menaruh perhatian terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan agar pembangunan politik dapat berjalan lebih baik. Hal itu juga diperlukan untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara dua lembaga.

Khusus mengenai tugas-tugas DPD RI yang harus ditindaklanjuti oleh DPR RI, Pimpinan Dewan antara lain telah menerima hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2006/2007 dan pelaksanaan Pendidikan Kedinasan, khususnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kedua hasil pengawasan DPD RI tersebut atas keputusan Badan Musyawarah telah diteruskan kepada Komisi terkait, yaitu Komisi X dan Komisi II. DPD RI juga sudah menyampaikan beberapa RUU, antara lain RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya juga memberikan pandangan atas RUU tentang Badan Hukum Pendidikan, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta memberikan pertimbangan atas RUU tentang APBN Tahun 2008.

Perlu pula kita sampaikan bahwa dalam Masa Sidang IV, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI telah melakukan kegiatan yang cukup padat dalam membahas masalah kerumahtanggaan antara lain dalam merencanakan dan menyusun anggaran DPR RI dan anggaran Setjen untuk tahun anggaran 2008, melakukan pengawasan tugas dan

Anggota Tidak Tetap DK-PBB. Dalam masalah Palestina, Pemerintah diharapkan mampu menciptakan forum maupun mediasi internasional yang bersifat obyektif sehingga konflik-konflik yang timbul di Palestina dapat diselesaikan secara proporsional.

Sementara itu, kita sangat menyayangkan kebijakan Uni Eropa yang melarang maskapai Indonesia melakukan penerbangan ke negara-negara Uni Eropa. Meskipun diketahui bahwa tidak ada penerbangan Indonesia yang membuka penerbangan langsung ke Eropa akan tetapi larangan itu akan memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan dunia pada penerbangan dalam negeri. Karena itu Pimpinan Dewan mengharapkan agar larangan ini bisa menjadi peringatan bagi para regulator penerbangan di Indonesia agar melakukan langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan internasional tentang keselamatan penerbangan. Hal ini sangat penting karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat internasional terhadap dunia penerbangan Indonesia. Kebijakan Uni Eropa ini juga diikuti oleh Kerajaan Arab Saudi yang meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan tentang persoalan penerbangan di Indonesia. Masalah ini dikuatirkan akan berdampak luas khususnya dalam kaitan dengan pengangkutan jamaah haji Indonesia.

Dalam pada itu, kita juga menyesalkan dikeluarkan *travel warning* atau *travel advisory* oleh Pemerintah Australia terhadap warga negaranya yang akan mengunjungi Indonesia dikaitkan dengan masalah keamanan dalam hubungannya dengan terorisme. Masalah keamanan dalam negeri Indonesia merupakan tanggung jawab Indonesia, untuk itu di masa-masa mendatang kerjasama tukar menukar informasi intelejen dengan negara tetangga perlu terus ditingkatkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum menutup Masa Sidang IV ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami menyampaikan ucapan "Selamat Ulang Tahun AIPO ke-30 dan Selamat Menyongsong Tranformasi AIPO menjadi AIPA". DPR RI telah memperingatinya melalui serangkaian kegiatan antara lain peluncuran perangko Ulang Tahun AIPO ke-30 dan menyelenggarakan lomba karya tulis mengenai transformasi AIPO menjadi AIPA yang diikuti oleh masyarakat luas. Tidak kurang dari 210 peserta telah berpartisipasi. Dengan transformasi

terjadi pada saat liburan panjang sekolah. Bahkan menurut informasi yang diterima Dewan, tingkat kecelakaan dan kematian di jalan raya di Indonesia tergolong tertinggi di dunia. Sebuah kenyataan yang tidak saja menyedihkan tetapi juga memalukan. Berkaitan dengan masalah ini, maka sudah sepantasnya Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem transportasi darat, termasuk melakukan audit terhadap semua operator bus angkutan umum, membuat standar kompetensi pengemudi angkutan umum, melakukan uji kelayakan angkutan penumpang, dan memberikan sanksi yang keras bagi para pelanggar, sehingga dapat diperoleh rasa keamanan dan kenyamanan warga masyarakat pengguna angkutan umum.



Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan perkembangan kebijakan politik internasional dewasa ini, Pimpinan Dewan menyambut baik telah digelarnya pemilihan umum anggota parlemen secara bebas dan damai di Timor Leste pada awal Juli 2007. Pimpinan Dewan mengharapkan agar melalui pemilu tersebut akan terbentuk Parlemen Timor Leste yang dapat terus mempertahankan hubungan baik kedua negara, terutama melalui kerjasama parlemen kedua negara yang selama ini telah terjalin baik.

Dewan juga memperhatikan secara saksama perkembangan yang terjadi di Palestina. Dewan sangat menyayangkan hancurnya pemerintahan bersatu Palestina akibat pertikaian antar-faksi beberapa waktu lalu. Konflik ini tidak hanya menghancurkan harapan rakyat Palestina akan terbentuknya sebuah negara Palestina yang merdeka di wilayahnya sendiri tetapi justru mengancam persatuan Palestina. Pimpinan Dewan menyerukan agar kedua pihak yang bertikai, yaitu Kelompok FATAH dan HAMAS segera melakukan rekonsiliasi melalui dialog secara internal agar terbentuk kembali sikap bersama atas nama rakyat dan perjuangan Palestina. Terbangunnya sikap bersama bisa mencegah pertumpahan darah antar-bangsa Palestina, serta antara Palestina dengan Israel, yang akhirnya bisa membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi dimulainya perundingan dengan agenda yang jelas yang dapat membantu penyelesaian isu-isu sensitif. Dewan meminta Pemerintah lebih optimal berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya mencermati posisi Indonesia selaku

kewajiban yang dilakukan oleh Setjen DPR RI dan tugas-tugas kerumah tanggaan lainnya.

Dalam pada itu Badan Kehormatan (BK) DPR RI telah melakukan berbagai aktivitas yang cukup tinggi. Badan Kehormatan DPR RI yang dibentuk sejak DPR RI periode sekarang ini sudah dikenal oleh masyarakat luas. Keputusan-keputusan yang diambil oleh BK telah mendapat tanggapan dari masyarakat, dan juga menuai pro dan kontra dari kalangan Dewan, khususnya atas kasus yang terjadi baru-baru ini yang berkaitan dengan ada tidaknya pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan. Namun demikian satu hal yang ingin kita tegaskan bahwa **eksistensi BK DPR RI** harus tetap dipertahankan, karena badan ini dibentuk untuk menjaga citra Dewan dan untuk menegakkan Kode Etik DPR RI. Oleh karena itu kepada Badan Legislasi (Baleg) dan kepada fraksi-fraksi DPR RI dapat bersama-sama menyempurnakan pedoman beracara sebagai Keputusan DPR yang akan menjadi dasar bagi bekerjanya BK DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan juga telah melakukan *fit and proper test* terhadap pencalonan dan pengangkatan pejabat publik, yaitu calon-calon Anggota Komnas HAM, calon Hakim Agung, dan calon Anggota Komisi Perlindungan Anak (KPAI) periode 2007-2010. Calon-calon pejabat publik tersebut telah dilaporkan dalam rapat paripurna Dewan untuk mendapatkan persetujuan. Kepada calon-calon keanggotaan lembaga tersebut yang telah terpilih melalui *fit and proper test*, Dewan mengucapkan “**Selamat Bekerja.**” Khusus untuk penetapan enam calon Hakim Agung MA baik yang datang dari jalur karier maupun non karier, kalangan Dewan menaruh harapan besar bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, memiliki integritas tinggi, kredibilitas, kualitas, dedikasi, dan profesionalitas dalam penegakan hukum di tanah air. Dewan berharap dengan terpilihnya enam Hakim Agung dari 18 orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial, diharapkan penumpukan kasus di MA selama ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 9000 perkara dapat ditangani dengan baik. Dewan juga berharap agar para Hakim Agung dapat melakukan perbaikan dan mempercepat reformasi peradilan sehingga citra, wibawa dan martabat MA sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan semakin meningkat.

Dewan juga sudah memberikan pertimbangan terhadap calon Duta-Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI ke negara-negara sahabat, dan Duta-Duta Besar negara sahabat untuk RI. Dalam memberikan pertimbangan calon-caion Dubes RI, kalangan Dewan menghendaki agar pengisian penempatan Duta-Duta Besar RI di luar negeri tidak mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, proses penetapan pemilihan dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya, dan diperlukannya peningkatan kualitas rekrutmen para calon Dubes dengan berbasis integritas, kompetensi, kemampuan menguasai permasalahan dan komunikasi, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional.

Dalam pada itu, untuk meningkatkan kinerjanya, Dewan telah membentuk satu tim yaitu Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI. Tim tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut dari Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang telah menyelesaikan tugas pada tahun 2006 lalu. Tim ini mendapat alokasi kegiatan yang cukup intens. Dari tim inilah diharapkan solusi atau pemecahan bagi peningkatan *performance* Dewan dalam pelaksanaan ketiga fungsinya yang selama ini menemui berbagai kendala. Masukan dari berbagai pihak telah dihimpun oleh tim ini, termasuk melakukan tukar fikiran atau dialog dengan delegasi parlemen luar negeri antara lain delegasi Kongres AS baru-baru ini. Penerapan otonomi anggaran Dewan, peningkatan fungsi legislasi, peningkatan dukungan keahlian bagi para anggota maupun alat-alat kelengkapan Dewan telah didiskusikan. Selain itu, dalam tim ini juga telah dibahas bentuk partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU, peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, perbaikan mekanisme dan tata cara rapat-rapat DPR RI, serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai pelaksanaan dari fungsi legislasi, pada Masa Sidang IV ini Dewan telah berhasil menyelesaikan 14 (empat belas) RUU untuk disahkan menjadi UU. Keempat belas RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang

Masalah pendidikan lainnya yang menjadi perhatian Dewan adalah Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Dewan sangat berharap Pemerintah dapat segera menyelesaikan semua masalah yang muncul berkaitan dengan kedua hal tersebut, seperti kasus penolakan siswa yang menderita cacat di SMP Percontohan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah; penyimpangan dana untuk Panitia PSB di Kota Depok, Jawa Barat; kasus joki dalam seleksi PMB melalui *short message service* (SMS) di Makassar, Sulawesi Selatan dan Bandung; serta kesalahan soal ujian seleksi PMB di Padang, Sumatera Barat. Dewan juga meminta perhatian pemerintah atas masih tingginya biaya daftar ulang untuk siswa di beberapa daerah. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang muncul di tengah masyarakat, Dewan menyambut baik rencana Pemerintah untuk membentuk konsorsium independen yang terdiri dari unsur Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan unsur independen untuk mengawasi proses sertifikasi guru di daerah sehingga tidak terjadi praktik jual beli sertifikat.

Berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, Dewan merasa prihatin dengan pelaksanaan ASKESKIN di lapangan yang sampai saat ini masih menemui sejumlah masalah, seperti perbedaan kriteria masyarakat miskin antara Departemen Kesehatan, BKBN, dan BPS, sehingga menyulitkan verifikasi; tidak adanya penetapan daftar penduduk miskin secara formal oleh pemda setelah dilakukan verifikasi, sehingga penerima ASKESKIN dapat berubah setiap saat dan rawan disisipi orang yang tidak berhak menerima bantuan; serta Kartu Keluarga Miskin (GAKIN) yang tidak segera dikeluarkan sehingga penduduk miskin harus mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Melalui Komisi terkait Dewan telah meminta PT. ASKES dan Departemen Kesehatan untuk melakukan sosialisasi secara komprehensif terhadap Program ASKESKIN dengan prosedur yang jelas sekaligus melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait menyangkut data rakyat miskin dan besaran premi pemerintah terhadap rakyat miskin.

Sidang Dewan yang terhormat,

Akhir-akhir ini, masyarakat dan kalangan Dewan sangat prihatin atas terjadinya berbagai kasus kecelakaan angkutan jalan raya yang menelan korban cukup besar dari warga masyarakat, khususnya yang

Masih berkaitan dengan masalah ekonomi, Dewan juga menaruh perhatian terhadap kenaikan harga minyak goreng dan susu untuk bayi yang akhir-akhir ini dirasakan memberatkan rakyat kecil. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk menekan harga agar tidak terjadi kenaikan yang drastis untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Selanjutnya, masalah konversi minyak tanah ke LPG juga menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, Pemerintah/Pertamina perlu melihat kemampuan masyarakat dalam melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG yang harganya berlipat ganda. Penentuan kebijakan itu hendaknya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan problem/konflik di masyarakat.

Selanjutnya, Dewan juga menaruh perhatian atas permasalahan giliran pemadaman listrik di sejumlah daerah. Masalah ini selain menambah penderitaan rakyat, juga berdampak kepada investasi. Oleh karena itu, Dewan meminta perhatian Pemerintah khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN untuk mengatasi masalah ini.

DPR juga meminta perhatian Pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah Nike dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan kelangsungan usaha.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah lain yang juga mendapat perhatian Dewan adalah penciptaan sumber daya manusia dikaitkan dengan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Kita sangat concem terhadap diperlukannya sistem pendidikan nasional yang komprehensif. Melalui Komisi X, Dewan meminta Pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan beberapa solusi yang tepat, antara lain mempublikasikan hasil evaluasi pelaksanaan UN pada masyarakat, memberikan sanksi berat kepada pelaku kecurangan pelaksanaan UN, terutama guru, pengawas, kepala sekolah, dan aparat dinas pendidikan, serta memberikan jalan keluar bagi peserta didik yang tidak lulus UN.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Energi, RUU tentang Perseroan Terbatas, RUU tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Cukai, dan delapan RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota. Kedelapan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten/Kota tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUU tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; RUU tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk pelaksanaan fungsi legislasi di bidang politik, pada Masa Sidang ini juga telah dibentuk dua Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan paket RUU dalam bidang politik dengan Pemerintah, yaitu RUU tentang Partai Politik; RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; RUU tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD; dan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pansus telah mulai bekerja pada masa persidangan ini. Kita berharap paket RUU-RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun sidang yang akan datang, yaitu sekitar bulan Desember 2007 agar proses pentahapan Pemilu dapat dipersiapkan dengan lebih baik, sehingga Pemilu 2009 dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan penyelesaian 14 RUU pada masa sidang ini, maka sejak pembukaan Masa Sidang I pada tanggal 16 Agustus 2006 yang lalu sampai dengan sekarang ini (selama satu tahun masa persidangan) telah dapat diselesaikan 49 RUU. Dan apabila kita melakukan inventarisasi terhadap RUU yang dihasilkan oleh DPR RI pada periode 2004-2009, telah dihasilkan sejumlah 76 UU.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selain dilakukan rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat komisi-komisi Dewan

dengan para menteri dan perangkat di bawahnya, juga telah digunakan hak Dewan yaitu dua Hak Interpelasi, pertama, hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah yang menyetujui Resolusi DK-PBB No. 1747. Dan kedua, hak interpelasi terhadap penyelesaian lumpur Lapindo Brantas. Hak interpelasi yang pertama sudah dilaksanakan sedangkan hak interpelasi yang kedua sedang dalam proses.

Dalam kesempatan rapat-rapat kerja telah dibahas, antara lain tentang perjanjian kerja sama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) antara Indonesia dengan Singapura. Komisi I DPR RI telah menolak DCA dalam bentuk dan rumusannya seperti yang sekarang ini. Bahkan dalam masalah ini, konsultasi DPR RI dengan Presiden RI pada tanggal 3 Juli 2007 telah merekomendasikan untuk dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan substansi DCA. Berdasarkan UUD Pasal 11, Pemerintah harus bekerja sama dengan DPR dalam membahas perjanjian maupun kebijakan luar negeri, khususnya berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan bangsa dan kemakmuran rakyat. Adapun mengenai *Extradition Treaty*, Komisi I DPR RI meminta agar pemerintah segera menyampaikan kepada DPR RI untuk dibahas secara komprehensif dalam proses ratifikasi.

Banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air, juga mendapat perhatian serius oleh kalangan Dewan. Kasus sengketa tanah yang sudah diidentifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional berjumlah sekitar 2.800 perkara. Tidak jarang sengketa tanah tersebut menimbulkan konflik yang sangat memperihatinkan bahkan sudah jatuh korban jiwa dari warga masyarakat seperti yang terjadi pada sengketa tanah di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Oleh karena itu, Dewan senantiasa minta agar persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan dengan baik dan adil, dengan penanganan yang cermat dari sisi administrasinya. Semua pihak yang terkait, khususnya lembaga peradilan umum dan Badan Pertanahan Nasional harus serius dan adil dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dengan memperhatikan tidak hanya pada bukti legal formal berupa sertifikat tanah semata-mata melainkan juga memperhatikan fakta kondisi sosial-kultural masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, saat ini banyak kasus korupsi terjadi di tanah air perlu mendapat perhatian kita semua. Berbagai kasus korupsi seperti dugaan korupsi dana nonbugeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), kasus Bantuan Likuiditas

menjaga stabilitas ekonomi makro terutama dalam menjaga indikator ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan kebijakan belanja pegawai, kalangan Dewan juga meminta Pemerintah untuk membuat dan menyusun sistem dan struktur penggajian PNS dalam upaya reformasi birokrasi secara keseluruhan. Selain itu juga perlu perhatian antara lain honorarium dan vakasi yang terintegrasi dalam sistem penggajian, keseimbangan tunjangan fungsional, seperti para pendidik, peneliti, perawat dengan para pejabat struktural. Dewan mengharapkan paling tidak gaji pokok dapat dicapai di atas kebutuhan hidup layak (KHL), selain tetap diberikannya gaji ke-13 serta tunjangan lainnya.

Berkaitan dengan kebijakan sistem penggajian, Dewan perlu menanggapi adanya kebijakan mengenai penggajian yang bertajuk reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan No. 289/KMK.01/2007 mengenai kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN). Dewan ingin menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan tunjangan dan gaji pegawai negeri sipil harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, skala prioritas, dan peraturan yang berlaku. Seharusnya kita lebih memperhatikan nasib sejumlah pegawai yang ditugaskan di pelosok dan pedalaman negeri ini dengan pendapatan yang tidak memadai. Kebijakan tersebut harus dibicarakan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan Dewan melalui Panitia Anggaran. Dewan mendukung adanya kebijakan reformasi birokrasi, tetapi seharusnya reformasi birokrasi tidak dilakukan secara parsial, harus menyeluruh.

Berkaitan dengan masalah pelaksanaan anggaran tahun 2007, Dewan terus mengawasi realisasi penyerapan APBN 2007, yang hingga semester I masih sangat rendah, di bawah sekitar 40%. Kondisi ini membuktikan bahwa APBN kini belum dapat diharapkan sebagai motor pemulihan ekonomi dan menstimulus kinerja sektor riil. Hal ini dikhawatirkan dapat membawa kegagalan pencapaian target APBN 2007. Dewan mengharapkan dalam masalah pertumbuhan ekonomi, sektor riil harus benar-benar diperhatikan karena kita berpendapat bahwa di sektor riil ini ternyata belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

peningkatan sektor produksi, terutama industri pengolahan dan pertanian. Kalangan Dewan pesimis apakah tingkat pertumbuhan tersebut akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dewan berpendapat pencapaian tersebut harus dilakukan dengan kerja keras lembaga pengelola fiskal dan tentunya harus berkoordinasi dengan institusi moneter agar sektor riil dapat berjalan serta ditingkatkan dalam upaya mendorong peranan masyarakat di dalam pembangunan ekonomi. Dewan memprediksikan perekonomian Indonesia tahun 2008 akan menemui beberapa tantangan, baik dari kondisi global/regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Tantangan tersebut antara lain perlambatan ekonomi regional maupun global, ketidakpastian harga minyak dan komoditi internasional serta ketidakstabilan pasar uang global. Tantangan dari dalam negeri adalah bagaimana mengimplementasikan pembangunan infrastruktur secara lebih baik dan memperbaiki iklim investasi.

Dalam pembicaraan tersebut juga disepakati agar tingkat inflasi dapat dijaga pada kisaran 5,5 - 6,5 persen, dengan menjaga stabilitas makro melalui tersedianya pasokan dan stabilitas bahan makanan pokok serta distribusinya, harga BBM, dan tarif dasar listrik. Masalah lain yang perlu diperhatikan tentunya nilai tukar rupiah yang berkisar Rp. 9.100—Rp.9.400. Apabila Pemerintah dapat mengendalikan perekonomian pada sektor moneter tersebut, maka stabilitas ekonomi makro akan dapat lebih terjaga. Dampak penurunan inflasi tersebut diharapkan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata pada kisaran 7,0 – 8,0 persen, dan perkembangan harga minyak dunia ICP sekitar US\$ 57,0 - 60,0 per barrel.

Dewan perlu menekankan agar asumsi ekonomi makro 2008 tersebut tidak hanya mengejar pencitraan saja, karena dikhawatirkan target tersebut dalam implementasinya akan sulit menyentuh rakyat kecil. Dewan berpendapat asumsi makro ekonomi hendaknya memperkokoh fondasi untuk menggerakkan sektor riil, perlunya dipersiapkan iklim investasi yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna berinvestasi pada sektor ekonomi yang bersifat padat modal dan padat karya.

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran indikator makro, dibutuhkan kebijakan, baik fiskal oleh pemerintah maupun moneter oleh BI. Kedua kebijakan tersebut harus dikoordinasikan dan diharmonisasikan secara maksimal. Hal ini sangat penting dalam

Bank Indonesia (BLBI), dan dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan dua kapal tanker raksasa Pertamina perlu segera dituntaskan. Penegakan hukum atas kasus korupsi tersebut harus dilakukan secara tegas, adil, transparan, dan tidak tebang pilih dengan tetap mengedepankan dasar praduga tidak bersalah. Penanganan kasus korupsi juga harus dilakukan secara hati-hati, tidak gegabah, dan berdasarkan pada hukum sehingga tidak menimbulkan fitnah. Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut, kalangan Dewan memandang perlu segera dibentuk UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); melakukan sinkronisasi antara UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Internasional Antikorupsi dalam kaitannya dengan uang hasil korupsi yang disinyalir dilarikan ke luar negeri.

Selain masalah korupsi, Dewan juga menaruh perhatian atas kasus tindak pidana umum dan tindak pidana lainnya seperti narkoba, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining* dan *trafficking* yang perlu segera diatasi dan diselesaikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk menjaga keutuhan wilayah negara, kalangan Dewan juga memberikan perhatian yang sangat serius atas berkembangnya kembali isu separatisme di beberapa kawasan tanah air beberapa waktu terakhir ini seperti yang terjadi di Maluku, Papua, dan penggunaan nama dan simbol Partai Lokal GAM di Aceh. Bagi bangsa Indonesia yang sedang berusaha melakukan proses membangun demokrasi pada era reformasi sekarang ini, proses penanganan atas isu separatisme ini sangat penting untuk diperhatikan. Dewan berpandangan perlunya dilakukan telaah secara kritis dan mendalam terhadap berbagai perangkat hukum yang melandasi pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan di berbagai tingkatan, baik berskala nasional maupun lokal. Upaya ini dilakukan agar tindakan aparat dan sikap yang dijalankan dalam menanggapi isu separatisme tidak bergerak tanpa arah atau hanya dilandasi nilai-nilai emosional atau tindakan sesaat. Sebaliknya, Kita juga mengharap, ekspresi kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya tidak menjalar ke arah sikap pembangkangan terhadap otoritas negara yang berdaulat yang mempunyai kewenangan sah serta memperoleh legitimasi politik dari seluruh rakyat Indonesia.

Harapan ke arah terbentuknya pemikiran yang kritis di atas didasarkan pada belum terakomodasinya materi muatan undang-undang dan perangkat peraturan pemerintah yang mengelola persoalan otonomi lokal dan pemerintahan, baik secara umum maupun secara khusus dalam menghadapi situasi dinamis yang sedang terjadi di masyarakat. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang melandasi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap menjadi acuan. Selama aspirasi yang disampaikan berada dalam koridor aturan main hukum yang sah dan tidak bergerak ke arah pemisahan dari ikatan bangsa atau keutuhan wilayah Indonesia sudah tentu dapat ditolerir. Namun demikian, ketika batas-batas kebebasan tersebut dilanggar dan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI, aparat yang berwenang sudah selayaknya mengambil tindakan tegas secara terukur terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan separatis dimaksud.

Persoalan atau isu separatisme tidak dapat diselesaikan semata-mata dari sudut pendekatan keamanan (*security approach*), tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh (*comprehensive approach*). Salah satu aspek mendasar yang menjadi muatan pendekatan menyeluruh tersebut adalah melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat. Prinsip penegakan nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam konteks aspek pendekatan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh tidak saja berlaku secara material, tetapi juga dituntut dapat menjawab nilai-nilai spiritual kemanusiaan itu sendiri. Melalui pendekatan pembangunan semacam itu diharapkan ketidakpuasan yang berkembang akan dapat ditekan seminimal mungkin dan rasa persaudaraan atau solidaritas atas prinsip hidup berbangsa dapat dipulihkan secara bertahap.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perkembangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah juga menjadi perhatian Dewan, antara lain Pilkada di DKI Jakarta yang akan segera berlangsung. Selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat memberikan arti yang sangat penting dalam penciptaan landasan hukum dalam

bekerjanya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Mengingat kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara, maka suksesnya Pilkada DKI Jakarta akan menjadi barometer bagi suskesnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, walaupun pilkada ini berada dalam domain lokal. Memperhatikan kecenderungan sikap sebagian masyarakat dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta, maka terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Untuk itu, pertama, warga masyarakat perlu menjaga agar pilkada dapat berlangsung secara tertib, damai, dan demokratis dengan partisipasi penuh dari warga masyarakat. Kedua, perlunya dilakukan pendataan pemilih yang lebih cermat agar tidak timbul berbagai masalah, seperti dugaan atau temuan atas hilangnya potensi suara rakyat yang berhak memilih dalam jumlah besar dan pemilih yang tidak dikenal (*ghost voter*).

Ketiga, dikembangkannya transparansi dan akuntabilitas atas penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye para kandidat. Masalah ini menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembahasan RUU bidang politik yang sedang ditangani Dewan bersama Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, baik komisi Dewan maupun Panitia Anggaran telah menuntaskan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008. Dengan demikian, pada Masa Sidang I, Dewan akan siap membahas RUU APBN 2008 dan Nota Keuangannya yang akan disampaikan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam tahun Sidang ini pun Dewan juga telah membahas, APBN-P 2007, membahas Laporan Semester I dan Prognosis APBN 2007. Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Dewan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang telah disampaikan kepada DPR pada pertengahan bulan Mei tahun berjalan, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008, Dewan telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi antara 6,5 - 6,9 persen. Dewan memberi catatan penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tingkat konsumsi, peningkatan investasi, ekspor non-migas, serta stimulus fiskal untuk